



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JOHAN EKO SUDARTO
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 758006

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.134.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/45 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 305.000.000
2. Tanah Seluas 1.400 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 102.000.000
3. Tanah Seluas 451 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000
4. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 152.000.000
5. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **169.000.000**

1. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **4.900.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **396.362.612**



F. HARTA LAINNYA

Rp. 65.500.000

Sub Total

Rp. 1.769.762.612

III. HUTANG

Rp. 100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.669.762.612

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.